

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pembangunan ekonomi daerah merupakan suatu proses pengelolaan sumber daya yang dimiliki oleh suatu daerah. Pengelolaan tersebut dilakukan oleh pemerintah daerah dan kelompok-kelompok masyarakat, atau oleh suatu kemitraan pemerintah daerah dengan swasta. Tujuannya adalah untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan untuk merangsang perkembangan kegiatan ekonomi di wilayah yang bersangkutan. Pembangunan daerah berkaitan dengan sumber daya alam, tenaga kerja, *enterpreneurship*, transportasi, komunikasi, komposisi industri, teknologi, luas daerah, pasar ekspor, situasi ekonomi internasional, kapasitas pemerintah daerah, pengeluaran pemerintah pusat, dan bantuan-bantuan pemerintah. (Makmun Syadullah, 2010: 339)

Dalam rangka penyelenggaraannya, pemerintah pada umumnya mengemban tiga fungsi, yaitu Fungsi Alokasi, Fungsi Stabilisasi, dan Fungsi Distribusi. Fungsi Alokasi meliputi sumber-sumber ekonomi dalam bentuk barang dan pelayanan jasa kepada masyarakat, sedangkan Fungsi Stabilisasi meliputi pertahanan keamanan ekonomi dan moneter, serta Fungsi Distribusi

antara lain meliputi pendapatan, kekayaan masyarakat, dan pemerataan pembangunan. Fungsi Stabilisasi dan Distribusi lebih efektif dilaksanakan oleh pemerintah pusat, sedangkan Fungsi Alokasi akan lebih efektif dijalankan oleh pemerintah daerah. Hal tersebut dikarenakan pada umumnya, pemerintah daerah lebih mengetahui kebutuhan standar pelayanan masyarakat. Oleh karena itu, dibutuhkan sumber penerimaan daerah. Salah satu dari sumber penerimaan daerah tersebut yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD). (Caroline, 2010: 73)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi. Dalam pelaksanaannya, Pendapatan Asli Daerah (PAD) bersumber dari retribusi dan pajak daerah, serta hasil kekayaan yang dimiliki daerah, dengan pemungutan yang dilakukan sesuai undang-undang yang berlaku. Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, sumber-sumber yang dimasukkan dalam pos Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari: Pajak Daerah, Retribusi

Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, serta Lain-lain PAD yang sah.

Ciri utama kemampuan suatu daerah adalah terletak pada kemampuan keuangan daerah, artinya daerah otonom harus memiliki kewenangan dan kemampuan dalam menggali sumber keuangan sendiri untuk menjalankan fungsi pemerintahan. (Koswara, 2000:50). Kuncoro (1995:9) menyebutkan bahwa kemampuan keuangan daerah diukur dengan melihat dua aspek penting yaitu ditinjau berdasarkan Derajat Desentralisasi Fiskal (DDF) dengan melihat perbandingan antara besarnya PAD dengan besarnya penerimaan daerah secara keseluruhan dan selain itu juga dapat ditinjau berdasarkan Indeks Kemampuan Rutin (IKR) dengan melihat perbandingan prosentase besarnya nilai PAD dengan pengeluaran rutin daerah yang distandarkan dengan kriteria masing-masing akan tetapi daerah-daerah masih pada kisaran 10 – 50 persen.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan tolok ukur yang penting untuk menentukan tingkat kemampuan daerah dalam melaksanakan otonomi daerah secara nyata dan bertanggung jawab. Otonomi daerah membawa dampak positif bagi daerah yang memiliki potensi sumber daya alam, tetapi tidak demikian dengan daerah yang miskin sumber daya alamnya, yang merupakan salah

satu masalah yang dihadapi pemerintah daerah kabupaten dan kota pada umumnya adalah terbatasnya dana yang berasal dari daerah sendiri, sehingga proses otonomi daerah belum bisa berjalan sebagaimana mestinya (Azis, 1997).

Peranan pemerintah daerah dalam menggali dan mengembangkan berbagai potensi daerah sebagai sumber penerimaan daerah akan menentukan keberhasilan pelaksanaan tugas pemerintah, pembangunan dan pelayanan masyarakat di daerah. Dengan menggali berbagai potensi pada suatu daerah diharapkan daerah dapat memanfaatkan potensi yang ada untuk meningkatkan pembangunan daerahnya.

Pembangunan pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan harkat, martabat, kualitas, serta kesejahteraan segenap lapisan masyarakat. Dalam kerangka itu pembangunan harus dipandang sebagai suatu rangkaian proses pertumbuhan yang berjalan secara berkesinambungan untuk mewujudkan tujuan-tujuannya. Pembangunan daerah yang dilaksanakan secara berencana, menyeluruh, terpadu, terarah, bertahap, mandiri dan berkelanjutan bertujuan untuk meningkatkan kemampuan daerah dalam rangka mewujudkan kehidupan yang sejajar dengan daerah lain yang lebih maju dan sekaligus secara agregat meningkatkan kesejahteraan

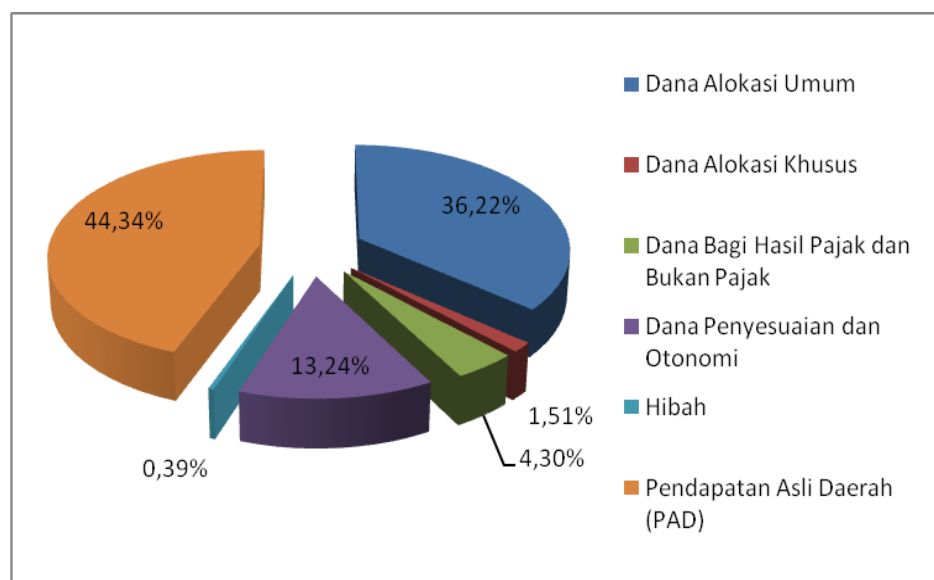
bangsa dan negara secara adil dan merata. Pemberian otonomi kepada daerah akan menjadi salah satu alternatif untuk meningkatkan peran nyata dan kemandirian daerah dalam upaya meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara adil dan merata. (Sumitro, 1995)

Menurut Kuncoro (1995), dalam pelaksanaan otonomi daerah nantinya dikhawatirkan banyak daerah kabupaten/kota yang tidak mampu membiayai kebutuhan daerahnya. Hal ini dapat dilihat dari kondisi keuangan daerah yang ada selama ini dimana porsi antara PAD dengan bantuan pusat sangat menjolok sekali bahwa lebih dari separuh jumlah kabupaten/kota di Indonesia memiliki PAD yang sangat minim dalam membelanjai kebutuhan anggaran daerahnya, yaitu dibawah 15 persen dari total anggaran secara keseluruhan.

Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki banyak potensi dan faktor produksi yang dapat digali sebagai sumber penerimaan daerah. Potensi-potensi dan faktor produksi tersebut terdapat di setiap kabupaten/kota di Daerah Istimewa Yogyakarta. Secara geografis, Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki luas wilayah sekitar 3.185,8 km² dan terbagi ke dalam lima wilayah administratif kabupaten/kota, yaitu :

1. Kabupaten Kulonprogo
2. Kabupaten Bnatul
3. Kabupaten Gunungkidul
4. Kabupaten Sleman
5. Kota Yogyakarta

Sejak diberlakukannya kebijakan otonomi daerah, masing-masing kabupaten/kota mempunyai hak dalam hal mengatur kebijakan fiskal dan menentukan arah pembangunan. Hal ini menyebabkan perkembangan kinerja perekonomian daerah/wilayah sangat tergantung pada strategi pembangunan ekonomi yang diterapkan oleh pembuat kebijakan (*decision maker*) di tingkat kabupaten/kota. (Analisis PDRB oleh BAPPEDA dan BPS: 2014)

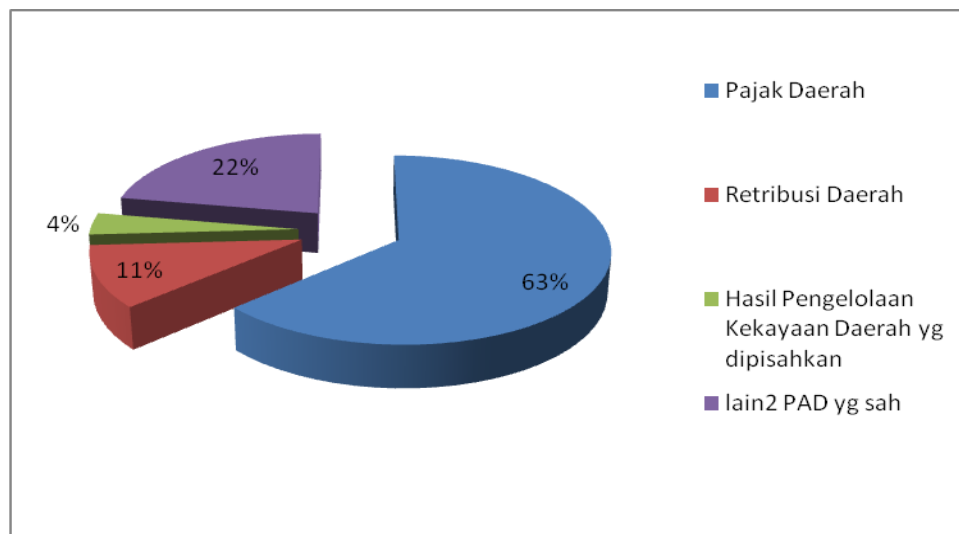


Sumber: DIY Dalam Angka, BPS D.I.Yogyakarta

Gambar 1.1.
Presentase Realisasi Anggaran Pendapatan Daerah
Pemerintah D.I. Yogyakarta tahun 2013

Diagram diatas menggambarkan kondisi keuangan Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2013 dilihat melalui anggaran pendapatan daerah di mana porsi terbesar diperoleh dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu sebesar 44,34 persen. Sementara itu sumbangan terkecil terhadap penerimaan daerah di D.I.Yogyakarta diperoleh dari hibah dengan presentase sebesar 0,39 persen. Hal tersebut dapat menunjukkan kemampuan Daerah Istimewa Yogyakarta dalam melaksanakan otonomi daerah dengan menggali potensi-potensi daerahnya yang tercermin dari tingginya sumbangan PAD terhadap penerimaan daerah di D.I.Yogyakarta.

Sebagai ibukota dari Daerah Istimewa Yogyakarta, Kota Yogyakarta merupakan pusat pemerintahan dimana terdapat banyak aktifitas ekonomi yang dilakukan di kota tersebut. Aktifitas-aktifitas ekonomi yang terjadi di Kota Yogyakarta tentunya memberikan sumbangan terhadap penerimaan daerahnya. Dari data yang diperoleh di Badan Pusat Statistik Kota Yogyakarta yang telah diolah, sumbangan terbesar untuk PAD Kota Yogyakarta diperoleh dari Pajak Daerah, menyusul kemudian lain-lain PAD yang sah, retribusi daerah dan hasil pengelolaan lain yang dipisahkan. Berikut hasil olah data mengenai sumber-sumber PAD.



Sumber: Data BPS yang telah diolah

Gambar 1.2.
Pos Penerimaan PAD Kota Yogyakarta Tahun 2013

Menurut Makmun Syadullah dalam bukunya yang berjudul *Krisis Ekonomi Global & Dampak Fiskal* (2010), hingga tahun kelima pelaksanaan desentralisasi fiskal (2006) sumber-sumber pendanaan pelaksanaan pemerintahan daerah provinsi, kabupaten dan kota secara keseluruhan masih bertumpu pada dana perimbangan. Dana perimbangan dalam struktur APBD provinsi, kabupaten dan kota menjadi komponen utama penggerak roda pemerintahan daerah, dengan kontribusi sebesar 76 persen dari APBD. Komposisi dana perimbangan sebesar itu berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar 59 persen, Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar 14 persen, dan Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar 3 persen. Komponen lain APBD selain dari dana perimbangan adalah PAD dan penerimaan lain-lain yang sah sebesar 24 persen. Dilihat dari dana perimbangan

bagi total pendapatan daerah, ketergantungan anggaran pemerintah provinsi merupakan yang terkecil. Porsi dana perimbangan pada APBD pemerintah provinsi hanya sebesar 48 persen. PAD pemerintah provinsi relatif cukup kuat sebagai sumber utama dalam membiayai belanja daerah.

Pengeluaran pemerintah merupakan salah satu instrumen utama kebijakan dalam upaya peningkatan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat di daerah. Oleh karena itu pemerintah daerah dan DPRD harus berupaya secara nyata dan terstruktur untuk menghasilkan APBD yang betul-betul mencerminkan kebutuhan riil masyarakat di daerah sesuai dengan potensi masing-masing. Untuk melihat apakah daerah telah siap secara finansial untuk menyongsong otonomi daerah, antara lain adalah dengan melihat apakah sumber-sumber penerimaan APBD nya mampu menutup anggaran belanja daerah yang bersangkutan. Di samping itu, anggaran belanja pembangunan yang dialokasikan pada program proyek yang langsung menyentuh sektor ekonomi produktif masyarakat akan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat. (Uppal, 1986)

Tabel di bawah ini menunjukkan realisasi penerimaan dan belanja daerah Kota Yogyakarta selama beberapa tahun terakhir.

Tabel 1.1
Realisasi Pendapatan dan Belanja Pemerintah Kota
Yogyakarta
Tahun 2011 – 2013

Rincian	2011	2012	2013
Pendapatan Daerah	951.681.434	1.158.134.797	1.071.527.411
Pendapatan Asli Daerah	228.870.562	338.839.606	304.797.499
Dana Perimbangan	500.613.750	602.310.072	656.301.045
Lain-lain Pendapatan yang Sah	222.197.122	216.985.119	110.428.867
Belanja Daerah	932.018.512	1.023.949.917	1.154.066.336
Belanja Tidak Langsung	608.011.246	609.959.214	563.575.857
Belanja Langsung	324.007.266	413.990.703	590.490.479
Surplus/(defisit)	19.662.922	134.184.880	(82.538.925)
Pembiayaan Netto	75.782.482	90.120.676	63.437.368

Sumber: BPS Kota Yogyakarta

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwasannya jumlah pendapatan daerah di Kota Yogyakarta mengalami kenaikan pada tahun 2012 dan menurun pada tahun 2013. Lain halnya dengan belanja daerah yang justru terus meningkat setiap tahunnya bahkan menyebabkan defisit di tahun 2013.

Pada dasarnya, pengeluaran pemerintah atau belanja daerah merupakan salah satu komponen kebijakan fiskal yang bertujuan untuk laju investasi, meningkatkan kesempatan kerja, memelihara kestabilan ekonomi dan menciptakan distribusi pendapatan yang merata. Dalam struktur APBD yang baru, sisa lebih APBD tahun lalu dan pinjaman (utang) tidak lagi dimasukkan sebagai unsur penerimaan daerah, namun dimasukkan sebagai pembiayaan daerah, sedangkan anggaran belanja rutin dan pembangunan yang ada pada

struktur APBD sebelumnya diarahkan menjadi belanja administrasi umum, belanja operasional dan pemeliharaan serta belanja modal yang diklasifikasikan dalam belanja aparatur daerah dan belanja pelayanan publik. Dengan struktur yang baru tersebut akan lebih mudah mengetahui surplus atau defisit dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah. Sehingga meningkatkan transparansi informasi anggaran kepada masyarakat (publik). Jika terjadi defisit anggaran untuk menutupnya disediakan pos tambahan yaitu pos pembiayaan. (Datu K, 2012: 23)

Pertumbuhan ekonomi daerah berkaitan erat dengan peningkatan produksi barang dan jasa, yang diukur dengan besaran dalam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), dan juga sebagai indikator untuk mengetahui kondisi ekonomi suatu daerah dalam suatu periode tertentu. Data PDRB juga dapat menggambarkan kemampuan daerah dalam mengelola sumberdaya pembangunan yang dimilikinya, oleh karena itu besaran PDRB setiap daerah bervariasi sesuai dengan potensi yang dimiliki dan faktor produksi masing-masing daerah. (Sukirno, 1978)

Secara teoritis, pertumbuhan PDRB berdampak positif terhadap penerimaan PAD. Pertumbuhan PDRB pada akhirnya akan berimplikasi pada penerimaan PAD. Apabila perekonomian tumbuh,

maka *tax bases* akan meningkat pula. Hal ini mengisyaratkan bahwa untuk meningkatkan PAD, daerah tidak serta merta hanya melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi. Namun pertumbuhan ekonomi harus menjadi fokus utama. (Syadullah, 2010: 340)

Tabel 1.2
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Yogyakarta
menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan, 2010 – 2013
(juta rupiah)

Lapangan Usaha	2010	2011	2012	2013^{*)}
Pertanian	17.455	17.755	17.939	18.190
Pertambangan dan penggalian	273	293	296	296
Industri pengolahan	594.845	606.849	598.159	638.805
Listrik, gas, dan air	68.726	71.777	75.936	79.699
Bangunan	426.740	449.854	475.073	504.309
Perdagangan, hotel dan restoran	1.393.111	1.460.971	1559.070	1.649.536
Pengangkutan dan komunikasi	1.098.383	1.185.006	1.268.866	1.366.604
Keuangan, sewa dan jasa perusahaan	770.658	820.765	886.591	923.103
Jasa-jasa	1.135.751	1.203.297	1.269.751	1.318.358
PDRB	5.505.942	5.816.568	6.151.679	6.498.900

Keterangan ^{*)} : Angka sementara

Sumber: BPS Kota Yogyakarta

Tabel 1.2 diatas memperlihatkan kesembilan jenis sektor lapangan usaha yang terdapat di Kota Yogyakarta dimana penyumbang PDRB terbesar diperoleh dari sektor perdagangan, hotel dan restoran sehingga dapat dikatakan bahwa sektor perdagangan, hotel dan restoran memberikan kontribusi yang cukup besar bagi peningkatan pendapatan daerah di Kota Yogyakarta.

Sementara itu nilai kontribusi paling rendah untuk PDRB Kota Yogyakarta disumbangkan oleh sektor pertambangan dan penggalian. Akan tetapi secara keseluruhan kesembilan sektor lapangan usaha tersebut selalu mengalami kenaikan setiap tahunnya. Peningkatan nilai PDRB tersebut diharapkan mampu memberikan dampak positif bagi PAD Kota Yogyakarta dalam membiayai pembangunan daerah. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah Kota Yogyakarta dalam mengkaji keterkaitan PDRB dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Selain PDRB sebagai salah satu tolok ukur pertumbuhan ekonomi, beberapa indikator ekonomi makro lainnya juga dapat digunakan untuk menentukan keberhasilan pembangunan ekonomi suatu daerah seperti tingkat inflasi, jumlah penduduk dan jumlah pengangguran. Tingkat inflasi dan pengangguran dapat dijadikan sebagai tolok ukur pembangunan ekonomi suatu daerah dalam jangka pendek, sedangkan jumlah penduduk merupakan permasalahan ekonomi makro dalam jangka panjang. (Agus Tri Basuki dan Nano Prawoto, 2014: 205)

Inflasi merupakan keadaan naiknya harga-harga barang dan jasa secara terus menerus di suatu wilayah dalam periode waktu tertentu (Korteweg, 1973; Auckley, 1978; Boediono, 2001). Adanya

inflasi pada suatu daerah, kabupaten atau kota menggambarkan adanya gejolak ekonomi. Apabila inflasi dibiarkan begitu saja tanpa dikendalikan akan berdampak pada perekonomian. Inflasi yang baik adalah inflasi yang kurang dari 10 persen, dan apabila tingkat inflasi melebihi 25 persen maka akan mengakibatkan nilai barang yang tinggi serta berdampak pada nilai tukar rupiah yang akan semakin menurun. (Iwan Susanto, 2014)

Kota Yogyakarta yang merupakan ibu kota Daerah Istimewa Yogyakarta dan termasuk salah satu kota besar di Indonesia mengalami tingkat inflasi yang fluktuatif setiap bulannya dari tahun ke tahun. Pada tahun 2013 laju inflasi Kota Yogyakarta tercatat pada angka satu digit yaitu sebesar 7,32 persen, lebih tinggi dibanding tahun 2012 yang hanya sebesar 7,32 persen. Menurut kelompok pengeluaran, inflasi relatif tinggi terjadi pada kelompok bahan makanan sebesar 12,31 persen. Sementara itu dari besaran inflasi pada tahun 2013 dapat dikatakan bahwa inflasi Kota Yogyakarta lebih rendah dari inflasi nasional yang sebesar 8,38 persen. (BPS Kota Yogyakarta, 2014).

Berikut tabel yang menunjukkan perbandingan inflasi Kota Yogyakarta dan Nasional selama beberapa tahun terakhir.

Tabel 1.3
Perbandingan Inflasi Kota Yogyakarta dan Nasional
(Jan – Des 2007 = 100) Tahun 2005 – 2013

Tahun	Kota Yogyakarta		Nasional	
	IHK	Inflasi	IHK	Inflasi
2013	145,65	7,32	146,84	8,38
2012	135,72	4,31	135,49	4,30
2011	130,11	3,88	129,91	3,79
2010	125,25	7,38	125,17	6,96
2009	116,64	2,93	117,03	2,78
2008	113,32	9,88	113,86	11,06

Sumber: BPS Kota Yogyakarta

Dari tabel diatas dapat dilihat tingkat inflasi Kota Yogyakarta yang naik turun dari tahun ke tahun beserta perbandingannya dengan besaran inflasi nasional. Kota Yogyakarta mengalami inflasi yang lebih besar dibanding dengan inflasi nasional pada beberapa tahun yaitu tahun 2009, 2010, 2011 dan 2012, meskipun angkanya tidak terpaut jauh dan masih termasuk dalam golongan inflasi rendah.

Seperti yang disebutkan oleh Iwan Susanto (2014) bahwa inflasi rendah adalah inflasi yang baik dan tingkat inflasi yang tinggi akan menyebabkan menurunnya nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing atau kurs. Di Kota Yogyakarta sendiri yang termasuk salah satu kota dengan aktivitas perekonomian yang cukup tinggi tidak terlepas dari transaksi pertukaran mata uang. Terlebih lagi Kota Yogyakarta merupakan kota pariwisata yang banyak dikunjungi oleh

wisatawan domestik maupun mancanegara. Wisatawan mancanegara tersebut yang banyak menyumbang aktivitas pertukaran mata uang di Kota Yogyakarta ini.

Nilai tukar mata uang atau kurs senantiasa berubah setiap harinya. Di Kota Yogyakarta sendiri pada tahun 2013 rata-rata nilai kurs dollar Amerika terhadap rupiah mencapai Rp. 10.575,50 yang artinya setiap satu dollar Amerika sama dengan 10.575,50 rupiah. Hal inilah yang kemudian menjadi pertanyaan penulis, apakah dengan semakin meningkatkan nilai mata uang dollar Amerika terhadap rupiah akan memberikan pengaruh terhadap perekonomian Kota Yogyakarta. Dimana seperti yang telah disebutkan diatas bahwa Kota Yogyakarta merupakan salah satu kota yang tidak terlepas dari transaksi pertukaran mata uang yang dalam hal ini kurs dollar Amerika sebagai acuan penelitian.

Dari beberapa hal, data dan gambaran kondisi perekonomian di Kota Yogyakarta yang telah dijabarkan diatas, penulis akan mencoba menganalisis hubungan antara variabel-variabel ekonomi makro seperti PDRB dan inflasi, serta variabel belanja daerah dan juga kurs dollar Amerika dengan penerimaan daerah dimana dalam hal ini yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Yogyakarta. Analisis mengenai hubungan-hubungan tersebut akan dirangkum

dalam sebuah penelitian yang berjudul “**Analisis Pengaruh PDRB, Inflasi, Belanja Daerah dan Kurs Dollar Amerika terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Yogyakarta Periode Januari 2010 – April 2013**”.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian di atas, adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah pengaruh PDRB terhadap PAD Kota Yogyakarta?
2. Bagaimanakah pengaruh tingkat Inflasi terhadap PAD Kota Yogyakarta?
3. Bagaimanakah pengaruh anggaran belanja daerah (ABD) terhadap PAD Kota Yogyakarta?
4. Bagaimanakah pengaruh kurs dolar terhadap PAD Kota Yogyakarta?
5. Apakah variabel PDRB, inflasi, anggaran belanja daerah, dan kurs dolar secara bersama-sama mempengaruhi PAD Kota Yogyakarta secara dominan?

C. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk:

1. Mengetahui adanya pengaruh yang signifikan antara

PDRB terhadap PAD Kota Yogyakarta.

2. Mengetahui adanya pengaruh yang signifikan antara tingkat inflasi terhadap PAD Kota Yogyakarta.
3. Mengetahui adanya pengaruh yang signifikan antara anggaran belanja daerah (ABD) terhadap PAD Kota Yogyakarta
4. Mengetahui adanya pengaruh yang signifikan antara kurs dolar terhadap PAD Kota Yogyakarta.
5. Mengetahui variabel yang dominan berpengaruh terhadap PAD Kota Yogyakarta.

D. MANFAAT PENELITIAN

Adapun manfaat yang diharapkan dari dilakukannya penelitian mengenai Analisis Pengaruh PDRB, Inflasi, Anggaran Belanja Daerah dan Kurs Dollar terhadap PAD Kota Yogyakarta adalah sebagai berikut:

1. Dapat dijadikan masukan bagi pemerintah daerah dalam mengambil kebijakan yang dalam hal ini kebijakan Pemerintah Kota Yogyakarta untuk mengoptimalkan potensi yang dimiliki Kota Yogyakarta guna meningkatkan sumber pendapatan asli daerah Kota Yogyakarta yang ditinjau dari berbagai sektor lapangan

usaha, pengendalian tingkat inflasi dan nilai mata uang asing serta penggunaan anggaran belanja daerah Kota Yogyakarta.

2. Dapat digunakan sebagai informasi dan sumber rujukan mengenai gambaran pengaruh PDRB, tingkat inflasi, anggaran belanja daerah, dan kurs terhadap PAD dan juga sebagai salah satu literatur untuk penelitian sejenis selanjutnya.